

**INSENTIF PELAPORAN DAN PERENCANAAN
PAJAK PERUSAHAAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Wenny Adelia Agasi

NIM. 12030111120003

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Wenny Adelia Agasi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120003
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **INSENTIF PELAPORAN DAN
PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN**
Dosen Pembimbing : Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 17 Februari 2015

Dosen Pembimbing

Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt

NIP. 1979092420081222003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Wenny Adelia Agasi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120003
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **INSENTIF PELAPORAN DAN
PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 3 Maret 2015

Tim Penguji:

1. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt (.....)
2. Dr. Darsono, S.E., MBA, Akt (.....)
3. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Wenny Adelia Agasi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Insentif Pelaporan dan Perencanaan Pajak Perusahaan**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 Februari 2015

Yang membuat pernyataan,

Wenny Adelia Agasi

NIM. 12030111120003

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of corporate tax position uncertainty, tax expertise, and performance-based remuneration incentives of its key management personnel on corporate tax avoidance. This study uses two control variables are ROA and external auditors.

The population in this study consists of all listed firm in Indonesia Stock Exchange in 2013. The sampling method in this research is purposive sampling. Criteria for firm is a manufacturing company and a company that serves the financial statements with currency. Another criteria is the firm must have complete data and support the implementation of research. Total sample in this study is 82 data. OLS regression used to be analysis technique.

The empirical result of this study show that uncertainty of a firm's tax position and the performance-based remuneration incentives of its key management personnel are positively significant influenced on corporate tax avoidance. Tax expertise has no influence on corporate tax avoidance.

Keywords: corporate tax avoidance, the uncertainty of of a firm's tax position, tax expertise, performance-based remuneration incentives of its key management personnel.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ROA dan auditor eksternal.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur dan perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. Kriteria lainnya adalah perusahaan harus memiliki data lengkap dan mendukung pelaksanaan penelitian, sehingga jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 82 data. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi OLS.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpastian posisi pajak perusahaan dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Keahlian pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Kata kunci: penghindaran pajak perusahaan, ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak, insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila
engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh bekerja (urusan), dan hanya kepada Tuhanmu lah
hendaknya engkau berharap.*

(Q.S. al –Insyirah 5-8)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah, Ibu dan Adik-adikku tercinta
Sahabat dan teman – temanku tersayang

LPM Edents dan KSPM

Keluarga besar Akuntansi 2011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dari :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi .
3. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Semua dosen dan staf tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Orang tua tercinta, Bapak A. Gani S.Sos., M.M. dan Ibu Lensi Hartati serta adik-adikku Fira Anggraini Agasi dan Regita Amalia Agasi, terima kasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Terima kasih pula untuk keluarga besarku yang ikut serta mendoakanku selama ini. Semoga saya dapat membanggakan kalian dan tidak mengecewakan kalian.

6. Terima kasih banyak untuk Dominggus Petra Nugrahedi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat untuk penulis. Semoga di masa depan kita dapat mencapai kesuksesan.
7. Sahabat-sahabatku, Afina Fauziyyah, Alisyia Misitama Sakti, Aristya Kartika Sari, Faridha Aripianti, Isti Nazilah, Iwana Shabahati, Kharisma Nisa Rosandrani, Nonie Dewinta, terima kasih banyak atas berbagai hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga kita semua sukses di masa yang akan datang.
8. Seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2011, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
9. Terima kasih untuk seluruh Edentser atas pengalaman dan kebersamaan selama berproses di LPM Edents, terutama untuk Mimah, Uul, Amel, Riska, dan Rani yang telah membantu saya menjadi lebih baik saat memimpin Edents.
10. Terima kasih untuk KSPM Rangers atas pengalaman dan kebersamaan selama berproses di KSPM.
11. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 17 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Telaah Teori	11
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	11
2.1.2 Penghindaran Pajak Perusahaan	12

2.1.3 Ketidakpastian Posisi Pajak Perusahaan.....	13
2.1.4 Keahlian Pajak Direksi	14
2.1.5 Insentif Remunerasi Berbasis Kinerja Personil Manajemen Kunci.....	15
2.1.6 Telaah Penelitian Sebelumnya.....	16
2.2 Kerangka Pemikiran	19
2.3 Hipotesis.....	22
2.3.1 Pengungkapan Ketidakpastian Posisi Pajak Perusahaan	22
2.3.2 Keahlian Pajak Direksi	26
2.3.3 Insentif Remunerasi Berbasis Kinerja Personil Manajemen Kunci.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	32
3.1.1 Variabel Penelitian.....	32
3.1.1.1 Variabel Dependen.....	32
3.1.1.2 Variabel Independen.....	33
3.1.1.3 Variabel Kontrol.....	33
3.1.2 Definisi Operasional Variabel	33
3.1.1.2 Penghindaran pajak perusahaan.....	33
3.1.1.2 Pelaporan ketidakpastian posisi pajak perusahaan.....	33
3.1.1.2 Keahlian pajak direktur.....	33
3.1.1.2 Insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci.....	34
3.1.1.2 Pengukuran variabel kontrol.....	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	35

3.5 Metode Analisis.....	35
3.5.1 Statistik Deskriptif	35
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	36
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas.....	37
3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	37
3.5.3 Uji Hipotesis	38
3.5.3.1 Uji Regresi OLS.....	38
3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	40
4.2 Analisis Data	41
4.2.1 Statistik Deskriptif	42
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	46
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas.....	49
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	50
4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis	51
4.2.3.1 Uji Signifikansi Simultan.....	51
4.2.3.2 Koefisien Determinasi.....	52
4.2.3.3 Model dan Uji t.....	53
4.3 Intrepretasi Hasil	56
4.3.1 Ketidakpastian Posisi Pajak Perusahaan.....	56
4.3.2 Keahlian Pajak	57
4.3.3 Insentif Remunerasi Berbasis Kinerja Personil Manajemen Kunci.....	58

BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Keterbatasan	62
5.3 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	40
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik	42
Tabel 4.3 One Sample Kolmogrov-Sminorv Test.....	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	49
Tabel 4.5 Hasil Uji F.....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Determinasi	53
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4.1 Histogram Normalitas.....	46
Gambar 4.2 Normal Probability Plot.....	47
Gambar 4.3 Heterokedastisitas.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN	67
LAMPIRAN B STATISTIK DESKRIPTIF	70
LAMPIRAN C UJI NORMALITAS	71
LAMPIRAN D UJI MULTIKOLONIERITAS	73
LAMPIRAN E UJI HETEROKEDASTISITAS	74
LAMPIRAN F REGRESI	74

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas beberapa sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Di bagian latar belakang masalah dijelaskan beberapa alasan mengapa penelitian mengenai insentif untuk pelaporan dan perencanaan pajak perusahaan di Indonesia perlu dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, di bagian rumusan masalah dijelaskan fokus utama penelitian yaitu tentang pengaruh ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak direksi, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada bagian tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat apa saja yang ada dalam penelitian ini. Bagian terakhir dari bab pendahuluan ini adalah membahas sistematika penulisan. Berikut penjelasan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak merupakan salah

satu sumber penerimaan negara. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak mencapai 1.310.219 milyar rupiah atau berkisar 78,81% dari total penerimaan negara (www.bps.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan demi kepentingan rakyat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak bertentangan dengan pemilik usaha yang cenderung akan mengurangi biaya atau beban usaha termasuk biaya atau beban pajak. Hal ini disebabkan pajak perusahaan dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, likuiditas, hasil operasi dan arus kas (Grubert dan Mutti, 1991; Shackelford dan Shevlin, 2001; Dhaliwal et al., 2005; Beattie et al., 2006 dalam Richardson dan Taylor, 2013). Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha. Selain itu, biaya atau beban pajak tidak memberikan manfaat atau kontra prestasi secara langsung bagi perusahaan.

Biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profits*), tingkat pengembalian (*rate of returns*), dan arus kas (*cash flows*) (Martatilova, 2009). Adanya potensi penurunan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas, serta tidak adanya kontra prestasi langsung mengakibatkan perusahaan cenderung untuk mengurangi biaya atau beban pajak perusahaan. Untuk meminimalkan beban pajak tersebut, perusahaan berpotensi melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk

melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen *et al.*, 2010). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya tersebut kerap disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Barr, 1997 dalam Masri dan Martani, 2012).

Penghindaran pajak perusahaan didefinisikan sebagai transaksi atau kejadian baik pasif maupun agresif yang mengarah pada pengurangan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan (Dyreng *et al.*, 2008). Di satu sisi, penghindaran pajak juga dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan dari strategi perencanaan pajak. Dalam rangkaian strategi perencanaan pajak, terdapat istilah lain dari penghindaran pajak seperti ketidakpatuhan (*noncompliance*), penggelapan (*evasion*), agresivitas (*aggressiveness*), dan penyembunyian (*sheltering*). Aktivitas strategi pajak bisa ada dimana saja di sepanjang rangkaian tersebut, hal ini tergantung dengan seberapa agresif aktivitas dalam mengurangi pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Penghindaran pajak dapat dicapai melalui metode yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Metode pengurangan pajak dapat berupa pasif (sesuai dengan ketentuan pajak) atau agresif (struktur transaksi atau kegiatan dengan salah satu prinsip tujuan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan). Penghindaran pajak dapat juga dicapai melalui cara ilegal atau cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Di Indonesia, peraturan khusus anti penghindaran pajak atau *specific anti avoidance rule* sudah ada dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan ini merupakan upaya untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Menurut Ibnu Wijaya (2014), seiring semakin kompleksnya skema-skema penghindaran pajak yang digunakan, ketentuan dalam Pasal 18 UU PPh tentu tidak mungkin dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak.

Di banyak negara, penghindaran pajak dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Perbedaan keduanya timbul dari motivasi wajib pajak atau dari ada tidaknya *moral hazard* dari wajib pajak (Martatilova, 2009). Penghindaran pajak yang diperbolehkan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Dalam beberapa penelitian dijelaskan mengenai dorongan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dyreng et al. (2010) mengamati bahwa perilaku eksekutif perusahaan seperti CEO dan direktur keuangan (CFO) mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat dan sifat penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut sebagai akibat dari bagaimana eksekutif perusahaan mempengaruhi pengendalian internal dan fungsi risiko perusahaan dan manajemen mereka melalui kebijakan yang mereka terapkan. Bahkan, Frank et al. (2009) dalam Richardson dan Taylor (2013) menemukan hubungan positif antara pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. Penelitian tersebut juga menyediakan

contoh perusahaan yang terlibat dalam manajemen laba terhadap laba kena pajak dan keuntungan keuangan yang secara bersamaan, yaitu laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan mengalami peningkatan (pelaporan keuangan agresif) dan penghasilan kena pajak perusahaan berhasil diturunkan (pelaporan pajak agresif) selama periode pelaporan yang sama. Perusahaan yang menunjukkan strategi pajak dan manajemen laba keuangan yang agresif pada saat yang sama cenderung memiliki strategi agresivitas investasi, pendanaan, operasi dan kompensasi (Frank et al., 2009 dalam Richardson dan Taylor, 2013).

Revsine et al. (2004) dalam Richardson dan Taylor (2013) menyatakan bahwa catatan pajak dalam laporan tahunan perusahaan dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang lebih dalam mengenai penilaian kinerja saat ini dan masa depan. Mereka juga berpendapat bahwa peningkatan kewajiban pajak tangguhan dapat menjadi sinyal awal yang memperburuk kualitas laba. Kualitas laba menjelaskan apakah laba dapat mencerminkan informasi mengenai keberlanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Yulianti, 2007). Berdasarkan hal tersebut, adanya peningkatan kewajiban pajak tangguhan bisa ditafsirkan sebagai informasi awal terjadinya penurunan dalam kualitas laba.

Di Indonesia diberlakukan *self assesment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Adanya sistem tersebut

memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan perhitungan dan memperkirakan pajak perusahaan sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan perhitungan antara pemerintah dan perusahaan terhadap pajak perusahaan tersebut. Perbedaan perhitungan pajak dapat terjadi karena adanya operasi yang bervariasi dalam pengenaan pajak, contohnya perbedaan dalam perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Adanya perbedaan perhitungan pajak tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian terhadap perhitungan pajak perusahaan. Dalam penelitian oleh Lev dan Nissan (2004), Hanlon (2005) dan Hanlon et al. (2007) ditemukan bahwa perusahaan dengan nilai *book-tax differences* (BTDs) yang besar secara signifikan berhubungan dengan persistensi laba (revisi laba yang diharapkan dimasa yang akan datang) dan ketepatan waktu. Dengan demikian, pengungkapan ketidakpastian terkait dengan perkiraan pajak dapat menurunkan informasi dari BTDs.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Grantley Taylor dan Grant Richardson (2013). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak direksi, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan. Ketidakpastian posisi pajak perusahaan merupakan pengungkapan oleh perusahaan mengenai ketidakpastian perhitungan pajak yang disebabkan oleh perbedaan perhitungan jumlah pajak perusahaan antara perusahaan dan pemerintah. Keahlian pajak direksi merupakan keahlian yang dimiliki oleh anggota direksi seperti pengalaman dalam akuntansi perpajakan atau pengalaman yang berkaitan dengan kerja audit. Insentif remunerasi berbasis

kinerja personil manajemen kunci merupakan total remunerasi yang dibayarkan kepada manajemen kunci. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur dan periode penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dijelaskan bahwa perusahaan berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai insentif atau dorongan perusahaan dalam upaya penghindaran pajak masih diperlukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penelitian ini masih menarik untuk diteliti lebih lanjut dan diaplikasikan di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh keahlian pajak yang dimiliki oleh direksi terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh keahlian pajak yang dimiliki oleh direksi terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak direksi, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan, dalam kaitannya dengan insentif perusahaan dalam perencanaan dan pelaporan pajak di negara berkembang seperti Indonesia.

2. Aspek Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai informasi tambahan dalam menentukan regulasi selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam menambah pemahaman mengenai penghindaran pajak terkhususnya pengaruh pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak direksi, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Mencakup teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil-hasil penelitian lainnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian sejenis berikutnya, dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan dibahas beberapa sub bab yang meliputi telaah teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Dalam telaah pustaka dijelaskan mengenai *agency theory* dan konsep mengenai penghindaran pajak perusahaan, ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian direksi, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci. Penelitian terdahulu juga dijelaskan pada sub bab telaah pustaka. Dari uraian telaah teori dan latar belakang dibentuk kerangka pemikiran penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut dikembangkan hipotesis dalam penelitian ini. Berikut penjelasan secara rinci mengenai telaah teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

2.1 Telaah Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) dalam Masri dan Martani (2012) mendeskripsikan *agency theory* (teori keagenan) sebagai kontrak kerja antara *principal* dan *agent*, yang mana satu atau beberapa *principals* (pemilik) mendelegasikan beberapa otoritas mereka untuk membuat keputusan kepada agen (manajer). Berdasarkan deskripsi tersebut, seorang agen atau manajer harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan kepada *owner* atau pemilik, seperti pengungkapan informasi akuntansi dalam bentuk laporan tahunan sebagai evaluasi kinerja manajer. Dalam teori agensi, para pemilik disebut evaluator informasi dan agen disebut pengambil keputusan (Hendriksen

dan Breda, 2000).

Teori agensi dapat mengarah pada terjadinya asimetris informasi yaitu kondisi dimana terjadinya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan agen. Asimetri informasi timbul karena agen berada dalam posisi mengetahui lebih banyak mengenai informasi perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Sebagai tambahan, asimetris informasi juga berpotensi timbul karena pemilik tidak dapat mengamati semua kegiatan manajer. Kegiatan tersebut mungkin berbeda dari kegiatan yang disukai oleh pemilik karena manajer mempunyai perangkat preferensi yang berbeda atau manajer sengaja lalai dalam melaksanakan tugasnya bahkan menipu pemilik. Situasi ini menciptakan masalah yang dikenal dengan *moral hazard* atau kekacauan moral.

2.1.2 Penghindaran Pajak Perusahaan

Menurut Dyreng et al. (2008), penghindaran pajak perusahaan didefinisikan sebagai transaksi atau kejadian (pasif atau agresif) yang mengarah pada pengurangan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Penghindaran pajak dapat dicapai melalui metode yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Metode pengurangan pajak dapat berupa pasif (sesuai dengan ketentuan pajak) atau agresif (struktur transaksi atau kegiatan dengan salah satu prinsip tujuan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan). Penghindaran pajak juga dapat dicapai melalui cara ilegal atau cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang

riil yang dapat diterima oleh fiskus. Lim (2011) dalam Masri dan Martani (2012) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Penghindaran pajak secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Masri dan Martani, 2012). Senada dengan hal tersebut, Suandy (2008) dalam Aditama dan Purwaningsih (2013) menyebutkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

2.1.3 Ketidakpastian Posisi Pajak Perusahaan

Perkiraan ketidakpastian atas kewajiban pajak saat ini (atau aset pajak kini) dapat dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, jika manajemen menghadapi ketidakpastian yang signifikan dalam memperkirakan kewajiban pajak perusahaan atau aset. Saat perusahaan melaporkan ketidakpastian pajak yang signifikan, itu merupakan sinyal bahwa perusahaan sedang menghadapi risiko pajak tertentu. Risiko ini terjadi karena tingginya kemungkinan ketidaksesuaian antara beban pajak yang dilaporkan dengan pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian oleh Mills dan Newberry (2005) dalam Richardson dan Taylor (2013), menemukan bahwa perusahaan dengan peringkat kredit lebih rendah melaporkan biaya bunga yang lebih rendah dalam laporan tahunan mereka

dibandingkan dengan yang tercatat dalam pengembalian pajak. Lisowsky et al. (2013) mengamati hubungan positif antara perusahaan yang mengungkapkan cadangan pajak laporan keuangan dan penggunaan *tax shelter* atau perlindungan pajak sebagai mekanisme prinsip untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kemungkinan bahwa penghindaran pajak terkait dengan pelaporan ketidakpastian yang signifikan atas perkiraan pajak dalam laporan tahunan.

Perusahaan yang merekam ketidakpastian dalam estimasi pajak akan mengurangi keinformatifan laba akuntansi mengenai laporan rekonsiliasi penghasilan kena pajak dalam laporan keuangan mereka. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi keputusan investor. Ketidakpastian atas estimasi pajak merupakan penentu potensi penghindaran pajak perusahaan.

2.1.4 Keahlian Pajak Direksi

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa dewan direksi merupakan puncak dari pengendalian keputusan dari suatu perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab untuk memantau manajemen perusahaan dan keputusan strategis serta operasional utama. Dalam beberapa penelitian (misalnya, Frank et al., 2009; Dyreng et al., 2010) disarankan bahwa perencanaan pajak agresif dikaitkan dengan oportunisme manajerial dan kemampuan. Hanlon dan Slemrod (2009) berpendapat bahwa para direktur dari beberapa perusahaan multinasional besar menyatakan dalam laporan tahunan mereka bahwa mereka berutang kepada pemegang saham untuk menurunkan pajak melalui cara yang diperbolehkan, sah, dan legal.

Anggota dewan yang memiliki keahlian pajak dapat secara efektif menggunakan kemampuan profesional mereka untuk memantau dan memberikan informasi kepada manajer dan untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak yang berlaku (Carter et al., 2003). Anggota dewan yang memiliki pengalaman pajak dapat berkontribusi sebagai sumber daya yang diperlukan untuk menuju pembangunan pengaturan pajak dan menambah secara signifikan fungsi pajak efektif dalam hal penurunan kewajiban pajak perusahaan (Maydew dan Shackelford, 2005).

2.1.5 Insentif Remunerasi Berbasis Kinerja Personil Manajemen Kunci

Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa peningkatan insentif kompensasi mengurangi penggunaan bebas pajak oleh perusahaan-perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah. Rego dan Wilson (2012) menyatakan bahwa remunerasi berbasis insentif ekuitas memotivasi manajer untuk melakukan perencanaan pajak berisiko. Manajer dengan proporsi lebih besar di risiko kas dan remunerasi berbasis ekuitas akan termotivasi untuk meningkatkan pendapatan setelah pajak untuk pemegang saham dan perusahaan.

Insentif remunerasi berbasis kinerja menyediakan kompensasi yang cukup bagi manajer untuk melakukan kegiatan pajak berisiko dan agresif yang biasanya menyebabkan penghindaran pajak. Armstrong et al. (2012) menemukan hubungan negatif yang kuat antara insentif kompensasi direktur dan ETR akuntansi, tetapi tidak ada hubungan yang signifikan dengan ETR tunai. Selain itu, Armstrong et al. (2012) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara insentif kompensasi dan BTDS. Dalam meneliti hubungan antara insentif berbasis remunerasi dan

penghindaran pajak, setiap hubungan potensial mungkin bukan merupakan akibat langsung dari perencanaan pajak melainkan hasil dari upaya terpadu oleh dewan direksi dan eksekutif untuk mengurangi hutang pajak perusahaan.

2.1.6 Telaah Penelitian Sebelumnya

Desai dan Dharmapala (2006) menganalisis hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan tumbuhnya insentif yang kuat untuk manajer. Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penyembunyian pajak, dengan cara yang konsisten dengan hubungan yang saling melengkapi antara pengalihan dan penyembunyian. Hasil lainnya adalah efek negatif ini terjadi terutama pada perusahaan yang memiliki susunan tata kelola yang lemah.

Aditama dan Purwaningsih (2013) meneliti mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian Aditama dan Purwaningsih (2013) yaitu bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini terdapat hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel penelitian melakukan perencanaan pajak dengan cara menghindari penurunan laba.

Richardson dan Taylor (2011) meneliti mengenai hubungan antara penghindaran pajak dengan *thin capitalization*, *transfer pricing*, *income shifting*, multinationalitas, dan *tax haven utilization*. Dalam penelitian yang dilakukan Richardson dan Taylor (2011) didapatkan hasil bahwa *thin capitalization*, *transfer*

pricing, income shifting, multinationalitas, dan tax haven utilization berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, et al. (2012) berkaitan dengan insentif untuk perencanaan pajak. Penelitian Armstrong et al. (2012) menemukan bahwa kompensasi insentif untuk direktur pajak menampakkan hubungan negatif yang kuat dengan *GAAP effective tax rate*. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesimpulan bahwa direktur pajak diberi insentif untuk mengurangi beban pajak perusahaan dalam laporan keuangan.

Richardson dan Taylor (2013) meneliti mengenai insentif untuk pelaporan dan perencanaan pajak perusahaan. Penelitian oleh Richardson dan Taylor (2013) menganalisis hubungan antara ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak, afiliasi pajak direktur, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci dengan penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari penelitian Richardson dan Taylor (2013) menyatakan bahwa ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci berpengaruh positif sebagai penentu penghindaran pajak perusahaan, sedangkan afiliasi pajak direktur berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Desai dan Dharmapala (2006)	<i>Corporate Tax Avoidance and</i>	Variabel dependen: penghindaran pajak (BTD)	- Meningkatkan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat

		<i>High Powered Incentives</i>	Variabel independen: insentif manajer	penyembunyian pajak. - Efek negatif ini terjadi terutama pada perusahaan yang memiliki susunan tata kelola yang lemah.
2.	Aditama dan Purwaningsih (2013)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non-Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Variabel dependen: manajemen laba Variabel independen: perencanaan pajak	Kecilnya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur
3.	Richardson dan Taylor (2011)	<i>International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence From Australian Firms</i>	Variabel dependen: penghindaran pajak Variabel independen: <i>thin capitalization, transfer pricing, income shifting, multinationalitas, dan tax haven utilization</i>	<i>Thin capitalization, transfer pricing, income shifting, multinationalitas, dan tax haven utilization</i> berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak
4.	Armstrong, Blouin, dan Larcker (2012)	<i>The Incentives For Tax Planning</i>	Variabel dependen: perencanaan pajak Variabel independen: insentif eksekutif	Kompensasi insentif direktur menunjukkan hubungan negatif yang kuat dengan GAAP ETR, tetapi sedikit hubungan dengan atribut pajak lainnya
5.	Richardson dan Taylor (2013)	<i>Incentives for Corporate Tax Planning and</i>	Variabel dependen: penghindaran	Posisi ketidakpastian pajak perusahaan, keahlian pajak, dan

		<i>Reporting: empirical Evidence from Australia</i>	pajak perusahaan Variabel independen: Ketidakpastian pajak, keahlian dan afiliasi pajak direktur, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci	insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci berpengaruh positif sebagai penentu penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan afiliasi pajak direktur berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
--	--	---	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Menurut Dyreng et al. (2008), penghindaran pajak perusahaan didefinisikan sebagai transaksi atau kejadian (pasif atau agresif) yang mengarah pada pengurangan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Lim (2011) dalam Masri dan Martani (2012) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengungkapan pajak mungkin berguna dalam mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang agresif menurunkan kewajiban pajak perusahaan mereka. Salah satu dari penelitian tersebut dilakukan oleh Balakrishnan et al. (2011) dalam Richardson

dan Taylor (2013) yang menemukan bahwa perusahaan yang menunjukkan perencanaan pajak yang agresif cenderung menampilkan peningkatan pada kompleksitas keuangan dan organisasi dan penurunan pada transparansi informasi. Selain itu, Lisowsky et al. (2013) mengamati hubungan positif antara perusahaan yang mengungkapkan cadangan pajak laporan keuangan dan penggunaan *tax shelter* atau perlindungan pajak sebagai mekanisme prinsip untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan

Adanya ketidakpastian dalam estimasi pajak dapat mengurangi informasi dari laba akuntansi yang dikaitkan dengan laporan rekonsiliasi penghasilan kena pajak dalam laporan keuangan mereka. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai keberlanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi keputusan investor. Selain itu, kompleksitas dan ketidakjelasan terkait dengan perencanaan pajak dalam beberapa yurisdiksi cenderung menimbulkan ketidakpastian perkiraan pajak. Ketidakpastian atas estimasi akuntansi pajak merupakan penentu potensi penghindaran pajak perusahaan.

Selain ketidakpastian posisi pajak perusahaan, penghindaran pajak perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh keahlian pajak direksi. Dyreng et al. (2010) menyatakan bahwa direksi dan personil manajemen puncak dapat mempengaruhi perencanaan pajak berisiko atau agresif dengan membentuk kesesuaian dan kerangka kepatuhan untuk perusahaan. Anggota direksi yang memiliki pengalaman pajak dapat berkontribusi sebagai sumber daya yang

diperlukan untuk membangun aturan pajak dan menambah secara signifikan efektivitas fungsi pajak dalam hal penurunan kewajiban pajak perusahaan (Maydew dan Shackelford, 2005). Berdasarkan hal tersebut, direksi yang memiliki keahlian pajak dapat memanfaatkan keahlian mereka untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan.

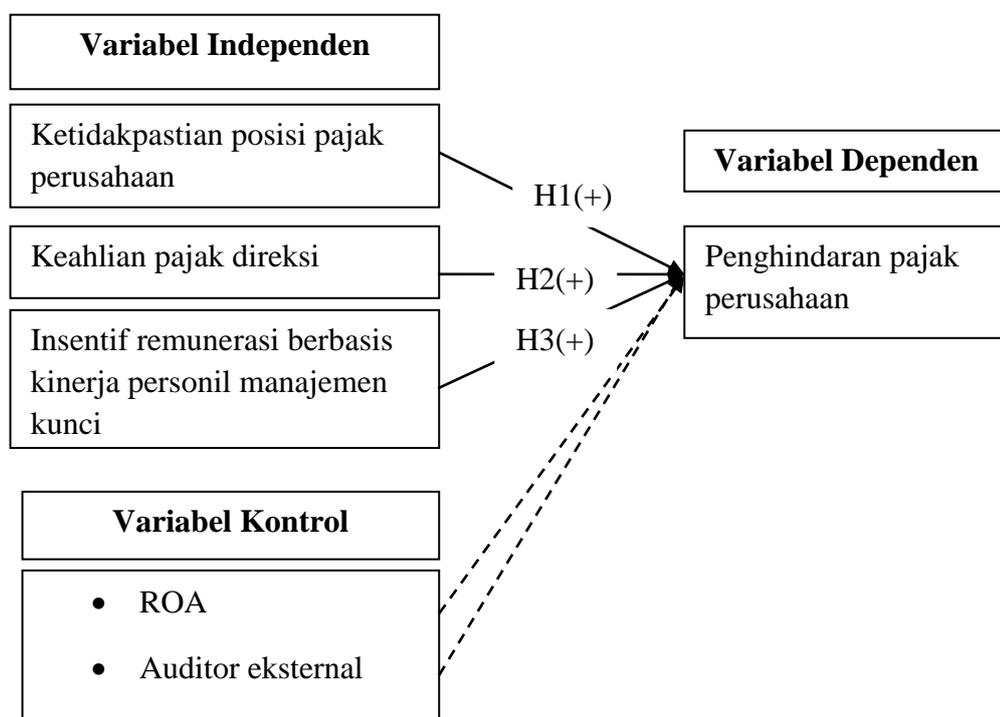
Selain ketidakpastian posisi pajak perusahaan dan keahlian pajak direksi, insentif atau dorongan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat dipengaruhi dengan adanya insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci. Rego dan Wilson (2012) menyatakan bahwa insentif remunerasi berbasis ekuitas akan memotivasi manajer untuk melakukan perencanaan pajak berisiko. Adanya remunerasi akan mengakibatkan manajer termotivasi untuk meningkatkan pendapatan setelah pajak untuk pemegang saham dan perusahaan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan setelah pajak adalah dengan mengurangi jumlah beban pajak penghasilan perusahaan.

Armstrong et al. (2012) meneliti mengenai insentif untuk perencanaan pajak. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kompensasi insentif untuk direktur menampakkan hubungan negatif yang kuat dengan GAAP *effective tax rate*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa direktur diberi insentif untuk mengurangi beban pajak perusahaan dalam laporan keuangan.

Insentif remunerasi berbasis kinerja memberikan manajer kompensasi yang cukup untuk melakukan kegiatan pajak berisiko dan agresif yang biasanya

menyebabkan penghindaran pajak. Risiko ini dapat mencakup ketidakpastian terkait dengan posisi pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah kerangka pemikiran penelitian seperti berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengungkapan Ketidakpastian Posisi Pajak Perusahaan

Dalam catatan atas laporan keuangan terdapat penjabaran mengenai penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi oleh manajemen. Penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi tersebut berkaitan dengan kondisi yang dialami perusahaan, salah satunya berkaitan dengan perhitungan pajak perusahaan. Perhitungan pajak perusahaan dengan *self assesment system*

memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan pajak perusahaan mereka. Dalam perhitungan pajak tersebut, perusahaan akan melakukan estimasi saat memperkirakan jumlah pajak perusahaan. Adanya estimasi dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan perbedaan dengan perhitungan pajak perusahaan tersebut oleh pemerintah. Perbedaan perhitungan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap pajak perusahaan. Ketidakpastian pajak perusahaan tersebut dapat dilaporkan oleh perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan.

Saat perusahaan melaporkan ketidakpastian pajak yang signifikan, itu merupakan sinyal bahwa perusahaan sedang menghadapi risiko pajak tertentu. Risiko ini terjadi karena tingginya kemungkinan ketidaksesuaian antara beban pajak yang dilaporkan dengan pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, kondisi tersebut dapat semakin memburuk ketika perusahaan bergerak dalam kompleks pengaturan dengan manajemen dan ketika auditor menghadapi kesulitan untuk menerapkan undang-undang pajak dengan benar. Di sisi lain, direksi harus memastikan bahwa program manajemen risiko secara keseluruhan dapat mengatasi risiko pajak perusahaan.

Dalam penelitian Richardson dan Taylor (2013) dijelaskan bahwa pengungkapan ketidakpastian pajak perusahaan dapat berkaitan dengan perencanaan pajak perusahaan. Hal ini disebabkan adanya estimasi dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan pajak dapat dikaitkan dengan strategi perencanaan pajak perusahaan tersebut. Penggunaan estimasi dan asumsi yang menimbulkan ketidakpastian pajak perusahaan dapat mengarah kepada

pengurangan jumlah pajak perusahaan berpotensi menyebabkan terjadinya penghindaran pajak perusahaan.

Wilson (2010) dalam Richardson dan Taylor (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kecenderungan menggunakan *off-balance-sheet financing* atau pendanaan di luar neraca cenderung tidak memiliki beban bunga yang rendah dalam laporan tahunan mereka dibandingkan dengan beban bunga yang tercermin dalam pengembalian pajak, sehingga akan menghasilkan pengurangan pajak. Pendanaan di luar neraca atau *off-balance-sheet financing* adalah metode penyajian dan pengungkapan mengenai pendanaan untuk perusahaan yang berada di luar neraca, laba rugi, dan arus kas. Pada umumnya item *off balance sheet* akan disajikan dan diungkapkan dalam pengungkapan tambahan pada laporan keuangan.

Pernyataan Wilson dalam penelitiannya didasarkan pada penelitian oleh Mills dan Newberry (2005). Dalam penelitian Mills dan Newberry (2005) yang dikutip dari Richardson dan Taylor (2013) ditemukan bahwa perusahaan dengan peringkat kredit lebih rendah melaporkan biaya bunga yang lebih rendah dalam laporan tahunan mereka dibandingkan dengan yang tercatat dalam pengembalian pajak. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kemungkinan bahwa penghindaran pajak terkait dengan pelaporan ketidakpastian yang signifikan atas perkiraan pajak dalam laporan tahunan.

Sifat transaksi yang kompleks dapat menyulitkan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk implikasi pajak dari suatu transaksi atau perjanjian (Desai dan Dharmapala, 2007

dalam Richardson dan Taylor, 2013). Balakrishnan et al. (2011) dalam Richardson dan Taylor (2013) menemukan bahwa perusahaan yang menunjukkan perencanaan pajak yang agresif cenderung menampilkan peningkatan pada kompleksitas keuangan dan organisasi serta penurunan pada transparansi informasi. Lisowsky et al. (2013) mengamati hubungan positif antara perusahaan yang mengungkapkan cadangan pajak laporan keuangan dan penggunaan *tax shelter* atau perlindungan pajak sebagai mekanisme prinsip untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan. Studi-studi ini menunjukkan bahwa pengungkapan pajak terutama pengungkapan ketidakpastian dalam estimasi pajak yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang agresif menurunkan kewajiban pajak perusahaan mereka.

Perusahaan yang merekam ketidakpastian dalam estimasi pajak akan mengurangi informasi dari laba akuntansi yang dikaitkan dengan laporan rekonsiliasi penghasilan kena pajak dalam laporan keuangan mereka. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai keberlanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Informasi ini tentu dapat mempengaruhi keputusan investor karena investor membutuhkan informasi yang tepat dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Terjadinya kekurangan informasi akan mengakibatkan investor harus mempertimbangkan kembali keputusan investasinya.

Ketidakpastian atas estimasi pajak merupakan penentu potensi penghindaran pajak perusahaan. Manajer dapat memanfaatkan subjektivitas mereka saat memperkirakan jumlah pajak perusahaan untuk memfasilitasi penghindaran pajak, seperti penilaian yang diperlukan pada aplikasi dan interpretasi undang-undang pajak penghasilan, perhitungan pajak tangguhan, penciptaan cadangan pajak yang berhubungan dengan audit pajak yang sedang berlangsung atau potensial, dan pada kemampuan perusahaan untuk menutup kerugian fiskal yang dapat dikompensasi (*carry-forward tax losses* atau CFTLs). Adanya kompleksitas dalam estimasi dan asumsi yang terkait dengan perencanaan pajak cenderung menimbulkan ketidakpastian perkiraan pajak. Untuk secara resmi menguji hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan ketidakpastian pelaporan posisi pajak perusahaan, maka hipotesis berikut diajukan:

H1. Pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2.3.2 Keahlian Pajak Direksi

Dewan direksi merupakan puncak dari pengendalian keputusan dalam suatu perusahaan. Dalam pengendalian keputusan tersebut, dewan direksi bertanggung jawab untuk memantau manajemen perusahaan dan keputusan strategis serta operasional utama. Dyreng et al. (2010) menyatakan bahwa direksi dan personil manajemen puncak dapat mempengaruhi perencanaan pajak berisiko atau agresif dengan membentuk kesesuaian dan kerangka kepatuhan untuk perusahaan.

Direksi dan personil manajemen puncak dapat mempengaruhi perencanaan pajak berisiko jika mereka memiliki keahlian pajak. Dalam hal ini keahlian pajak tersebut dapat dimiliki oleh anggota direksi melalui pengalaman dalam akuntansi perpajakan atau pengalaman kerja audit yang berkaitan dengan pajak. Pengalaman dalam akuntansi perpajakan dapat diperoleh dewan direksi melalui pelatihan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan mereka. Selain itu, pengalaman kerja audit juga dapat dikaitkan keahlian pajak karena pajak merupakan salah satu bagian yang akan diaudit oleh auditor. Seorang auditor yang terlibat dalam bidang perpajakan harus memiliki pengetahuan tentang pajak. Berdasarkan hal tersebut, adanya pengalaman audit yang dimiliki oleh direksi memungkinkan dewan direksi memiliki keahlian pajak yang dapat digunakannya dalam menentukan strategi perencanaan pajak perusahaan.

Anggota direksi yang memiliki keahlian pajak dapat secara efektif menggunakan kemampuan profesionalnya untuk memantau dan memberikan informasi kepada manajer, serta untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap aturan pajak yang berlaku (Carter et al., 2003). Dalam pengembangan dan pelaksanaan aturan untuk secara signifikan mengurangi kewajiban pajak perusahaan diperlukan koordinasi dari berbagai kelompok profesional, termasuk departemen pajak, penasihat hukum, akuntan, auditor, dan penasihat keuangan, yang semuanya dapat menawarkan nasihat pajak sebagai input. Hal ini menjelaskan bahwa perencanaan pajak tidak hanya mengandalkan keahlian pajak direksi.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa dewan direksi yang memiliki keahlian pajak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan berkaitan dengan perencanaan pajak. Keahlian pajak yang dimiliki direksi tersebut dapat berguna jika mereka memiliki pengalaman pajak yang diperlukan. Dewan direksi dapat berkontribusi sebagai sumber daya yang diperlukan untuk membangun aturan pajak dan menambah secara signifikan efektivitas fungsi pajak dalam hal penurunan kewajiban pajak perusahaan (Maydew dan Shackelford, 2005). Direksi yang memiliki pengalaman pajak dapat mengidentifikasi peluang tambahan karena keahlian mereka dalam menyetujui dan merumuskan rencana pajak. Untuk secara resmi menguji pengaruh anggota direksi yang memiliki keahlian pajak terhadap penghindaran pajak perusahaan, berikut hipotesis yang diajukan:

H2. Anggota direksi yang memiliki keahlian pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2.3.3 Insentif Remunerasi Berbasis Kinerja Personil Manajemen Kunci

Personil manajemen kunci perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, personil manajemen kunci akan mendapatkan remunerasi. Dalam hal ini, remunerasi merupakan suatu bentuk pembayaran periodik yang diberikan kepada karyawan yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Berkaitan dengan

remunerasi personil manajemen kunci, terdapat beberapa penelitian yang menguji apakah terdapat pengaruh pemberian remunerasi kepada personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan hasil yang beragam.

Penelitian oleh Watts dan Zimmerman (1990) dan Walsh dan Ryan (1997) dalam Richardson dan Taylor (2013) menyatakan bahwa insentif remunerasi dapat memotivasi personil manajemen kunci (direksi dan eksekutif perusahaan) untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian Watts dan Zimmerman (1990) dan Walsh dan Ryan (1997), penelitian yang dilakukan oleh Phillips (2003) yang dikutip dari Richardson dan Taylor (2013) tidak menemukan bukti bahwa CEO yang menerima bonus akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan. Senada dengan penelitian Phillips (2003), Armstrong et al. (2012) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kompensasi insentif dan *book-tax differences* (BTDs) yang merupakan salah satu proksi dalam mengukur penghindaran pajak perusahaan.

Desai dan Dharmapala (2006) juga meneliti hubungan antara kompensasi manajemen dan penghindaran pajak. Mereka mengusulkan bahwa peningkatan kompensasi dapat membantu menyelaraskan insentif agen dan prinsipal dalam kerangka lembaga yang menyebabkan manajemen untuk melakukan investasi yang berisiko, keuangan dan keputusan pajak. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa peningkatan kompensasi akan mengurangi penggunaan bebas pajak oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur tata kelola perusahaan yang lemah.

Dalam penelitian Rego dan Wilson (2012) dinyatakan bahwa insentif remunerasi berbasis ekuitas akan memotivasi manajer untuk melakukan perencanaan pajak berisiko. Remunerasi dengan jumlah yang besar akan mengakibatkan manajer termotivasi untuk meningkatkan laba setelah pajak untuk kepentingan pemegang saham dan perusahaan. Hal ini disebabkan adanya remunerasi dengan jumlah besar akan meningkat biaya atau beban yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan biaya agensi. Padahal, di sisi lain direksi dan manajer harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham perusahaan dengan meningkatkan laba setelah pajak. Untuk memenuhi kepentingan pemegang saham tersebut, maka biaya atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dikurangi. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengurangi jumlah beban pajak penghasilan perusahaan. Pengurangan jumlah beban pajak perusahaan dapat mengarah pada penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, adanya kompensasi yang cukup melalui insentif remunerasi berbasis kinerja dapat memotivasi manajer untuk melakukan kegiatan pajak berisiko dan agresif yang biasanya menyebabkan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjabaran dari penelitian-penelitian sebelumnya didapat hasil yang beragam terkait dengan pengaruh insentif remunerasi personil manajemen kunci terhadap penghindaran pajak perusahaan. Menurut Armstrong et al. (2012), dalam meneliti hubungan antara insentif berbasis remunerasi dan penghindaran pajak setiap hubungan yang potensial belum tentu dapat berakibat langsung terhadap perencanaan pajak. Hal ini disebabkan perencanaan pajak merupakan hasil dari upaya bersama dewan direksi dan eksekutif untuk

mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3. Insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian akan dibahas beberapa sub bab yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Dalam sub bab variabel penelitian dan definisi operasional variabel dijelaskan mengenai variabel dependen, independen dan kontrol yang disertai cara pengukuran masing-masing variabel. Populasi dari penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumenter. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi dengan model *ordinary least square* (OLS). Berikut penjelasan secara rinci variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

3.1.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang sedang diprediksikan atau diperkirakan (Lind, Marchal, Wathen, 2012). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan.

3.1.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi dasar dari perkiraan atau estimasi (Lind, Marchal, Wathen, 2012). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketidakpastian posisi pajak perusahaan, keahlian pajak direksi, dan insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci.

3.1.1.3 Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini, variabel kontrol yang digunakan adalah:

- *Return on Assets* (ROA)
- Auditor eksternal

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Penghindaran pajak perusahaan

Penghindaran pajak perusahaan diukur dengan *book-tax differences* (BTDs). BTDs diukur dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurangi penghasilan kena pajak dibagi total aset.

3.1.2.2 Pelaporan ketidakpastian posisi pajak perusahaan

Ketidakpastian posisi pajak perusahaan diukur dengan variabel dummy yaitu bernilai 1 jika perusahaan mengungkapkan ketidakpastian yang terkait dengan posisi pajak dan 0 untuk sebaliknya.

3.1.2.3 Keahlian pajak direksi

Keahlian pajak direksi diukur dengan variabel dummy yaitu bernilai 1 jika terdapat setidaknya satu orang dari direksi yang memiliki keahlian atau pengalaman yang berkaitan dengan pajak atau audit dan 0 untuk sebaliknya.

3.1.2.4 Insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci

Insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci diukur dengan logaritma natural total kompensasi, yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima personil manajemen kunci (dewan komisaris dan direksi) selama satu tahun.

3.1.2.5 Pengukuran variabel kontrol

1. *Return on Assets* (ROA) dimasukkan dalam penelitian untuk mengendalikan kinerja perusahaan dan mengeluarkan akibat tertentu dari penghindaran pajak. ROA diukur sebagai pendapatan sebelum pajak dibagi dengan total aset.
2. Auditor eksternal (AUD) dimasukkan dalam penelitian untuk mengendalikan pengawasan perusahaan dan kualitas audit (Matsumura dan Tucker, 1992; Rezaee, 2005 dalam Richardson dan Taylor, 2013). AUD diukur sebagai variabel dummy 1 jika perusahaan mempekerjakan auditor eksternal yang merupakan anggota Big 4 dan 0 sebaliknya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013. Selanjutnya untuk pemilihan sampel digunakan metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu :

1. Perusahaan publik manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013.

2. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
3. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap dan mendukung pelaksanaan penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses dari www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumenter. Data-data perusahaan yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan berdasarkan data empiris dan dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan, dalam hal ini laporan tahunan dan laporan keuangan.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data, sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Tujuan pengujian ini adalah mempermudah pemahaman terhadap

variable-variabel yang digunakan. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya terdistribusi secara normal. Untuk mengetahui bentuk distribusi data, bisa dilakukan dengan grafik distribusi dan analisis statistik. Pengujian dengan grafik distribusi dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dalam penelitian ini untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan program SPSS dengan analisis grafik Normal Probability Plot dan Uji Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2006).

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen pada model regresi. Untuk menguji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan heterokedastisitas, sedangkan adanya gejala residual yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan homokedastisitas (Ghozali, 2006). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), dimana sumbu X adalah yang diprediksi dan sumbu Y adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

- a) Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Uji Regresi OLS

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model regresi *ordinary least squares* (OLS). Sebelum analisis regresi digunakan, perlu dilakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran variabel secara umum, seperti rata-rata, persebaran data, standar deviasi, dan nilai tengah data. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum data dianalisis dengan menggunakan metode regresi. Model regresi *ordinary least squares* (OLS) dalam penelitian ini adalah:

$$\text{BTDS}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{Ketidakpastian Pajak}_{it} + \beta_2 \text{Keahlian Pajak}_{it} + \beta_3 \text{Remunerasi}_{it} \\ + \beta_4 \text{ROA}_{it} + \beta_5 \text{AUD}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan

BTDS : Penghindaran pajak perusahaan

Ketidakpastian Pajak : Pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan

Keahlian Pajak : Keahlian pajak direksi

Remunerasi : Insentif remunerasi berbasis kinerja personil manajemen kunci

ROA : *Return on assets*

AUD : Auditor eksternal

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilaksanakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung dilihat dari koefisien *standardized* yang memberikan nilai *path* atau jalur. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).